

MULTIKULTURALISME DAN PENDIDIKAN DAMAI PERSPEKTIF KH. ABDURRAHMAN WAHID

Muhammad Ulul Fahmi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: ululfahmi4@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the importance of multicultural values and peace education from the perspective of KH. Abdurrahman Wahid. This study uses a qualitative approach to the type of literature review (library research). The data collection uses the documentation method, while the data analysis technique is carried out by content analysis. The analysis was carried out by examining the works of KH. Abdurrahman Wahid related to multicultural values and peace education. The results of this study indicate that the ideas of KH. Abdurrahman Wahid about multiculturalism can be used as material and reference in peace education, so that the those people who are full of hatred and anger to commit various acts of violence, conflict, intolerance and radicalism eventually becomes peaceful, full of love, and tolerant person. It leads to more tolerant, just and peaceful society.

Keywords : Multiculturalism, Education, Peace

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pentingnya nilai-nilai multikultural dan pendidikan damai perspektif KH. Abdurrahman Wahid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis telaah kepustakaan (library research). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik analisa datanya dilakukan dengan analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan cara menelaah karya-karya KH. Abdurrahman Wahid yang terkait tentang nilai-nilai multikultural dan pendidikan damai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang nilai-nilai multikultural bisa dijadikan bahan dan acuan dalam pendidikan damai, agar orang yang dipenuhi emosi, nafsu dan juga amarah untuk berbuat berbagai tindakan kekerasan, konflik, intoleransi dan radikalisme akhirnya menjadi orang yang dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, dan toleran antar sesame. Dan ahirnya, hal ini akan mengarah pada terwujudnya masyarakat yang toleran, aman, adil dan damai.

Kata Kunci : Multikulturalisme, Pendidikan, Damai

Pendahuluan

Diskursus pendidikan multikultural, sejatinya, memang tidak pernah hadir pada ruang kosong. Gagasan ini hadir kala sebuah negara mengalami ancaman konflik horizontal dan disintegritas sosial karena hadirnya krisis kepercayaan kelompok yang satu terhadap yang lainnya. Di Amerika misalnya, pendidikan multikultural hadir untuk meminimalisir *living conflict* antara kelompok kulit putih dan hitam (Banks, 1994). Hal yang sama juga terjadi di Inggris. Model pendidikan multikulturalisme dijadikan tawaran untuk mendesiminasikan nilai masyarakat global dan proteksionisme negara demokratis kepada semua pendatang (*immigrant atau diasporas society*) di negara tersebut. Di Indonesia, gagasan ini hadir karena adanya tragedi kebangsaan sebelum reformasi. Otonomisasi kewenangan, dan demokratisasi-substantif (menghindari istilah demokrasi liberal) dijalankan di Indonesia. Sejarah pun mencatat bahwa, kondisi Indonesia kala itu menghadap krisis multi dimensi, mulai dari kuatnya *distrust* terhadap pemerintah, intoleransi terhadap agama lain, konflik masyarakat akibat persoalan ekonomi dan sosial, serta riak konflik berbasis pada perbedaan budaya di wilayah-wilayah tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru di dunia pendidikan, yakni paradigma nilai-nilai pendidikan multikultural. Paradigma nilai-nilai pendidikan multikultural tersebut pada akhirnya bermuara pada terciptanya sikap siswa atau peserta didik yang mau memahami, menghormati, menghargai perbedaan budaya, etnis, agama dan lainnya dan tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk bersatu. Dengan perbedaan, siswa justru

diharapkan tetap bersatu, tidak bercerai-berai dan mereka juga diharapkan menjalin kerja sama serta berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairaat*) di kehidupan yang sangat kompetitif saat ini (Muhammad Candra Syahputra, 2010).

Salah satu tokoh yang *concern* dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai multikulturalisme dan pendidikan damai adalah KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keragaman atau multikulturalisme merupakan sebuah realitas yang ada di negeri ini. Namun, sejak orde baru berkuasa, masyarakat Indonesia yang dikenal beragam dipaksa untuk taat dan patuh terhadap aturan pemerintah sebagai akibat dari hal tersebut dan kebebasan berpendapat dibungkam. Pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid, kebebasan berbicara kembali terbuka lebar.

Multikulturalisme didalamnya mengandung nilai-nilai toleransi, (inklusif), humanis dan adil yang bisa dijadikan bahan untuk pendidikan damai. Penanaman nilai toleransi dapat menenangkan jiwa yang sebelumnya penuh emosi, nafsu dan amarah untuk berbuat kekerasan, pengrusakan dan konflik. Pendidikan multikulturalisme diharapkan dapat melahirkan orang yang memiliki jiwa yang dipenuhi ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antar sesama. Maka, terwujudnya masyarakat Indonesia yang toleran, aman, adil dan damai bukanlah sekedar cita-cita semata. Disinilah letak urgensi dan tujuan dari penelitian jurnal ini. Penelitian ini bertujuan menggali nilai multikulturalisme dan pendidikan damai KH. Abdurrahman Wahid.

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan cara mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2005) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan (*library research*). Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang dipertanyakan (Masyhuri dan M. Zainudin, 2008). Penelitian ini berusaha mengumpulkan data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap karya buku, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder dalam hal ini pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang multikulturalisme dan Pendidikan Damai.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pengertian Multikulturalisme dan Pendidikan Damai

Secara sederhana multikulturalisme bisa dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Multikulturalisme dapat pula diartikan sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman (Azra, 2005).

Multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” yang berarti plural, “kulturalisme” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah *plural* mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu pluralisme bersangkutan dengan prinsip-prinsip demokrasi (H.A.R. Tilaar, 2004).

Suku bangsa diyakini memiliki status setara dan memiliki hak untuk menjaga warisan budaya mereka. Multikulturalisme bertujuan untuk “merayakan perbedaan”. Dalam pendidikan misalnya pengajaran multi-agama, pertunjukan ritual dan promosi makanan etnis menjadi aspek kebijakan pendidikan (Barker, 2000).

Pengertian multikulturalisme menurut Barker terbagi menjadi dua tahap perkembangan. Pertama, aliran multikulturalisme disebut pengertian tradisional multikulturalisme yang mempunyai dua ciri utama, yaitu: 1. kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), 2. Legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Tahap pertama mencakup hal-hal yang esensial di dalam perjuangan kelakuan budaya berbeda (*the other*). Selanjutnya, pada tahap perkembangan, paham multikultural telah menampung berbagai jenis pemikiran baru sebagaimana berikut :

- a. Pengaruh studi cultural; Studi cultural (*cultural studies*) antara lain melihat secara kritis masalah-masalah esensial di dalam kebudayaan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan di dalam masyarakat

yang diskriminatif, peranan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi, feminisme, dan masalah-masalah kontemporer seperti toleransi antarkelompok dan agama.

- b. Poskolonialisme; Pemikiran poskolonialisme melihat kembali hubungan antara eks penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak stigma yang biasanya merendahkan kaum terjajah. Pandangan poskolonialisme adalah ingin mengungkap kembali nilai-nilai *indigenous* di dalam budaya sendiri dan berupaya untuk melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing.
- c. Globalisasi; Globalisasi telah melahirkan budaya global yang memiskinkan potensi-potensi budaya asli. Revitalisasi budaya local adalah salah satu upaya menentang globalisasi yang mengarah kepada monokultural.
- d. Feminisme dan postfeminisme; Gerakan feminisme yang semulanya berupaya untuk mencari kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki kini meningkat ke arah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan juga menuntut sebagai mitra yang sejajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam masyarakat.
- e. Teori ekonomi politik Neo-Marxisme; Teori ini terutama memfokuskan kepada struktur kekuasaan di dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh kelompok kuat. Teori Neo-Marxisme dari Antonio Gramsci

mengemukakan mengenai hegemoni yang dapat dijalankan tanpa revolusi oleh intelektual organis yang dapat mengubah suatu masyarakat.

- f. Post-strukturalisme; Pandangan ini mengemukakan mengenai perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur-struktur yang telah mapan yang biasanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada.

Dalam pengertian yang lain dijelaskan bahwa Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat heterogen dimana tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnis sangat lumrah terjadi. Masyarakat multikultural diciptakan mampu memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom. Dengan demikian terciptanya suatu sistem budaya (*culture system*) dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.

Pendidikan damai, secara spesifik, dapat dipahami dari pendapat Tricia S. Jones, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baedhowi dalam Sukendar (2011) mendefinisikan pendidikan damai atau pendidikan resolusi konflik sebagai “*a spectrum of processes that utilize communication skills and creative and analytic thinking to prevent, manage, and peacefully resolve conflict*.”

Untuk lebih memahami makna pendidikan damai dalam pengertian *Boulding* di atas, maka ada baiknya jika istilah tersebut *breakdown* kata-perkata,

yaitu kata “pendidikan” dan “damai”. Dua kata tersebut adalah konsep yang perlu dipahami untuk mengerti apa itu pendidikan damai. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut akan muncul sebuah konsep yang merupakan perpaduan dari konsep “pendidikan” dan “damai”. yaitu pendidikan damai.

Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan sumberdaya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya (Idris, 1987). Kata pendidikan mempunyai keragaman makna yang kompleks. Keragaman makna tersebut merupakan sebuah hal yang wajar, karena masing-masing ahli memiliki pendapat dan perbedaan latar belakang baik pendidikan, budaya, agama, sosial maupun lainnya.

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan pendidikan. Setiap definisi menunjukkan pandangan individu dalam pemikirannya masing-masing, misalnya bagi ahli biologi pendidikan adalah adaptasi, bagi ahli psikologi pendidikan merupakan sinonim dari belajar, sedangkan ahli filsafat berpandangan bahwa pendidikan merupakan cerminan ideologi yang dianut setiap individu (Ahmadi, 2004). Dalam konteks sosio-kultural dan pedagogik, kata pendidikan memberikan pengertian yang beragam misalnya, Koentjaraningrat mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk mengalihkan adat-istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru (Naim dan Syauqi, 2010).

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1)

Kata ‘*damai*’, sebagai kata inti dari ‘*kedamaian*’, menurut Ichsan Malik dapat didefinisikan sebagai dihormatinya manusia dan kemanusiaan secara optimal akibat bekerjanya sistem sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan secara efektif, yang berujung kepada terwujudnya keadilan kepada semua pihak. Definisi ini bersifat menyeluruh, untuk membedakannya dengan damai yang cukup diartikan sebagai berakhirnya perang yang terjadi, atau berhentinya konflik kekerasan (Malik, 2008).

Selanjutnya, Reardon dalam Malik (2008) menegaskan bahwa damai adalah ketiadaan kekerasan dalam berbagai bentuk, apakah itu bentuk fisik, sosial, psikologis, maupun struktural. Damai dalam pengertian di atas juga dapat berpotensi menyebabkan pengabaian terhadap perasaan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik.

2. Nilai - Nilai Multikulturalisme KH. Abdurrahman Wahid

a. Nilai Saling Menghargai

Saling menghargai bisa diartikan sebagai sikap toleran atau sikap saling menghormati antar kelompok dan individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya baik berupa pendapat,

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lainnya yang berbeda. Sikap saling menghargai juga memberikan penghargaan terhadap mereka yang memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Sikap saling dapat terlihat dalam bentuk saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan (Harun, 2019).

KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur merupakan seorang yang memegang kuat keyakinan terhadap Tuhannya. Keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadikann Gus Dur sosok yang toleran. Gus Dur kecintaan terhadap manusia sebagai bentuk ketauhidan dan kepatuhannya terhadap Tuhannya. Dan ini yang membuat dirinya mempunyai sikap empati dan menghargai manusia serta makhluk lainnya.

Gagasan Gus Dur lainnya yang orisinal dan mengandung nilai saling menghargai adalah "Pribumisasi Islam". Gagasan ini pertama kali dipaparkan dalam dua tulisan Gus Dur yaitu tulisan yang berjudul "*Salahkah Jika Dipribumikan?*" Tulisan kolomnya di majalah tempo pada 16 juli 1983, dan kedua, "pribumisasi Islam", antologi tulisan dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (Tim INCRes, 2000). Pemikiran Gus Dur ini pada awal kemunculanya banyak menimbulkan perdebatan menarik

dalam lingkungan para intelektual, baik intelektual senior (tua) dengan intelektual muda. Namun, diakui oleh Gus Dur sendiri, ia bukanlah yang pertama yang memulai. Ia adalah generasi pelanjut dari langkah strategis yang pernah dijalankan oleh Wali Songo (Baso, 2006).

b. Nilai Humanisme

Humanisme merupakan prinsip nilai yang menonjol dari pikiran-pikiran KH. Abdurrahman Wahid. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana KH. Abdurrahman Wakhid mengapresiasi hal-hal yang baik pada diri manusia dan sekaligus sebagai wujud dari ketundukan kepada Allah. Baginya, manusia menempati kedudukan yang tinggi di alam semesta, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang seimbang dengan kedudukan tersebut.

Menurutnya, manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar. Hak-hak dasar itu, yang dalam konteks lain disebut hak-hak asasi manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia menyangkut berbagai aspek seperti penyediaan kebutuhan pokok, perlindungan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan berserikat, perlakuan yang sama di muka hukum (Payaman J. Simanjuntak, tt).

KH. Abdurrahman Wahid juga merupakan seorang tokoh dari beberapa tokoh Islam yang konsisten mengusung gagasan tentang humanisme. Dalam

pandangan beliau humanisme tidak berhenti hanya pada kebebasan berpikir demi pembentukan diri sendiri, seperti yang terjadi dalam spirit humanisme Eropa. Bagi beliau, humanisme sebagai otonomi diri bukan tujuan, melainkan syarat bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia secara umum. Hak-hak dasar itu mencakup hak hidup, hak beragama, hak kepemilikan, hak berkeluarga, dan hak profesi. Oleh karena itu, humanisme KH. Abdurrahman Wahid bukan humanisme pencerahan yang bersifat individualis dan beliau hanya mengambil mekanisme humanisme pencerahan, yakni rasionalisasi, guna merasionalisasikan Islam, demi pemenuhan hak-hak dasar manusia (Arif, 2013).

c. Nilai Inklusif

Terbuka dalam berfikir bisa juga dinamakan dengan sikap inklusif atau sikap menghargai perbedaan, baik dalam bentuk pendapat, pemikiran, etnis, tradisi budaya hingga perbedaan agama (Achmad Junaidi, 2004). Pandangan inklusif KH. Abdurrahman Wahid ditunjukkan dari sikap beliau yang menolak formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi Islam. Menurut beliau, mereka yang terbiasa dengan formalisasi, akan terikat kepada upaya-upaya untuk mewujudkan "sistem Islami" secara fundamental dengan mengabaikan pluralitas masyarakat (Wahid, 2006). Di sisi lain, KH. Abdurrahman Wahid melihat bahwa upaya ini mudah

untuk mendorong umat Islam kepada upaya-upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Pada akhirnya upaya tersebut menjadi legitimasi dalam melakukan kekerasan sebagai respon terhadap resistensi masyarakat yang majemuk.

d. Nilai Keadilan

Menurut Gus Dur, nilai keadilan telah ditegaskan oleh UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan NKRI adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Kalau Negara lain mengedepankan kemakmuran dan kemerdekaan, sedangkan Negara kita lebih mengedepankan keadilan yang bersamaan dengan kemakmuran (Wahid, 2006). Gus Dur meyakini bahwa martabat kemanusiaan hanya mungkin bisa ditegakkan kalau keadilan dapat ditegakkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan individu.

Keadilan menyangkut aspek-aspek keseimbangan, kelayakan hidup, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan mensyaratkan adanya kesetaraan dan sikap non-diskriminasi yang harus dilakukan, baik individu maupun kolektif. Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam

realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan.

Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggungjawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat (Ridwan, 2019).

3. Implikasi Nilai-Nilai Multikultural KH. Abdurrahman Wahid Terhadap Pemikiran Pendidikan Damai

a. Implikasi Nilai Saling Menghargai

Sikap toleransi berimplikasi terhadap perdamaian. Pengenalan benih-benih sikap toleransi, penghargaan terhadap sesama dalam pendidikan formal maupun non-formal baik disekolah-sekolah akan menjadi fondasi kuat bagi tercapainya perdamaian. Menguatnya sikap toleransi juga dapat bermanfaat untuk menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah perpecahan dan juga menyatukan perbedaan.

Pemikiran Gus Dur lainnya yang mengandung nilai saling menghargai adalah “Pribumisasi Islam”. Gagasan ini pertama kali dipaparkan dalam dua tulisan Gus Dur yaitu tulisan yang berjudul “*Salahkah Jika Dipribumikan?*” Tulisan kolomnya di majalah Tempo pada 16 juli 1983, dan kedua, “pribumisasi Islam”, antologi tulisan dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (Tim INCRoS, 2000).

Pemikiran Gus Dur ini pada awal kemunculanya banyak menimbulkan perdebatan menarik di kalangan para intelektual muslim, baik intelektual senior (*tua*) dengan intelektual muda. Tetapi sebagaimana diakui Gus Dur sendiri, ia bukanlah yang pertama yang memulai. Ia adalah generasi pelanjut dari langkah strategis yang pernah dijalankan oleh Wali Songo (Baso, 2006).

Penghargaan terhadap tradisi atau budaya ditengah masyarakat yang selaras dengan gagasan “Pribumisasi Islam” juga berimplikasi untuk mendamaikan masyarakat dan menghindarkan gesekan-gesekan antar sesama. Maka, tradisi lokal yang sudah terbentuk sejak lama dapat terpelihara dan mereka yang masih menjunjung tinggi nilai tersebut merasa dihargai. Hal ini bisa menghindarkan perpecahan di masyarakat. Cara ini merupakan model dakwah Walisongo yang mendamaikan budaya Islam dengan budaya lokal. Walisongo berdakwah dengan tidak dengan cara memaksa atau bahkan melalui peperangan. Melalui cara ini, penduduk lokal tidak lari dan tidak juga melawannya. Walisongo mendakwahkan Islam dengan jalan perdamaian dan menghargai tradisi atau budaya.

b. Implikasi Nilai Humanisme

Dalam pandangan Gus Dur, agama dan kemanusiaan adalah dua hal yang menyatu dalam diri manusia. Seseorang tidak boleh mengatasnamakan agama

kemudian merendahkan kemanusiaan dan atas nama kemanusiaan lalu merendahkan agama. Keduanya adalah sesuatu yang sistemik dan holistik. Beragama yang benar adalah beragama yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dan berkemanusiaan yang benar adalah yang didasari oleh keyakinan agama yang benar. Jadi, relasi antara agama dan kemanusiaan bukanlah saling menihilkan tetapi saling menguatkan dan mengisi.

Atas dasar pemikiran seperti ini, maka Gus Dur sering mengecam beragama yang bercorak formalistik yang seringkali “mengabaikan” dimensi kemanusiaan. Gus Dur juga menentang penggunaan atribut agama yang berpotensi merusak lainnya, seperti demonstrasi yang menggunakan kalimat “*Allahu Akbar*” dan berujung menyakiti orang lain atau bahkan pengrusakan bangunan. Hal tersebut i dalam pandangan Gus Dur adalah keberimanan yang menekankan pada dimensi formalisme agama.

Pandangan Gus Dur mengenai humanisme juga terlihat pada pandanganya tentang universalisme Islam. Menurutnya, Islam adalah agama yang *rahmat al lil ‘alamin*, rahmat sekalian alam, melindungi minoritas dan mengajarkan perdamaian.

Kaitannya dengan pendidikan damai, unsur humanisme sangat diperlukan dalam kurikulum pendidikan berbasis kemanusiaan. Melalui

kurikulum pendidikan ini, penanaman sikap penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang latarbelakang apapun dapat mencegah terjadinya perpecahan dan menjaga perdamaian. Penanaman prinsip ini juga meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan.

c. Implikasi Nilai Inklusif

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mengedepankan watak inklusifisme dan berkoitmen dalam menciptakan budaya yang demokratis. Hal ini secara khusus diterapkan di internal warga *nahdliyin*. Budaya keterbukaan (inklusif), budaya untuk saling menghargai, dan toleran (*tasamuh*) terhadap perbedaan pendapat, perbedaan agama, menjadi ciri khas dari sikap kemasyarakatan NU. Sementara itu, di luar komunitas NU, perubahan yang paling terasa adalah tumbuhnya budaya untuk menghargai kelompok atau komunitas lain, termasuk kelompok minoritas, baik etnis, maupun agama. Ditinjau dari perspektif yang lebih luas, aspek penting yang seharusnya dibangun oleh seluruh komponen bangsa ini adalah dialog. Dialog menandakan adanya kemauan dan keterbukaan diri untuk saling menghargai. Kemauan dan keterbukaan ini membutuhkan proses yang tidak mudah. Tidak jarang dialog hanya berhenti pada tataran formalitas dan para peserta dialog mungkin terlibat dalam percakapan, akan tetapi masing-masing tidak memiliki kemauan

dan kesadaran untuk membuka diri dan tanpa kemauan untuk saling memberi dan saling menerima (Hidayat, 2001).

Pendekatan dialog secara inklusif sering dipraktekkan Gus Dur ketika menghadapi permasalahan yang berbau SARA, contohnya seperti yang terjadi di Papua. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur mengajak dialog seluruh komponen masyarakat yang ada dan tidak hanya warga Papua saja tetapi juga anggota OPM atau yang sekarang dinamakan KKB. Dalam dialog tersebut, Gus Dur mengusulkan nama Irian Jaya diganti menjadi Papua sebagai penghormatan rakyat Irian Jaya. Tidak hanya itu, Gus Dur juga mengizinkan OPM mengibarkan bendera bintang kejora, sebagai bendera kebudayaan rakyat Papua.

Hal ini yang belum bisa ditiru oleh pemimpin lainnya setelah beliau. Tidak banyak pemimpin yang berani melakukan dialog secara terbuka dengan para separatis. Pendekatan yang dilakukan Gus Dur terhadap mereka menyebabkan Gus Dur sangat dihargai dan dicintai rakyat Papua hingga saat ini. Konflik dan kekerasan saat itu bisa diatasi dengan baik, masyarakat hidup rukun dan damai, kekerasan bisa hentikan dengan tanpa memakan korban jiwa.

Dengan demikian, dialog merupakan salah satu bentuk sikap atau nilai inklusif. Dalam pendidikan dan pengajaran tentang

menciptakan kedamaian, perlu menekankan nilai atau prinsip inklusif atau keterbukaan karena pendidikan damai mengajarkan untuk berfikir secara terbuka, demokratis dan tidak ditutup-tutupi dalam berbagai hal.

d. Implikasi Nilai Keadilan

Dalam memperjuangkan keadilan, setiap masyarakat harus berani untuk menyuarakannya ide dan gagasannya dengan memahami segala resikonya. Gus Dur pada masa Orde Baru secara konsisten mengkritik kebijakan Soeharto yang dinilai tidak adil dan mementingkan kelompok tertentu. Beberapa peristiwa kekerasan dan ketidakadilan banyak dibela oleh Gus Dur. Pembelaan terhadap korban-korban ketidakadilan ini diyakini Gus Dur sebagai bagian dari etis dan moral kemanusiaan. Akan tetapi dalam kesempatan lain, Gus Dur mengingatkan pentingnya penegakan keadilan dan pembelaan terhadap korban-korban ketidakadilan sebagai bagian dari perintah agama.

Implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga Negara adalah dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. Prinsip keadilan perlu ditekankan dalam kurikulum pendidikan, hal ini penting karena anak didik harus mengerti akan pentingnya memaknai keadilan karena perdamaian akan sulit diwujudkan jika konflik, ketidakadilan masih terjadi dan kerap dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan (Falah, 2019).

Keadilan menjadi syarat bagi terciptanya perdamaian. Beberapa konflik diberbagai belahan dunia salah satunya disebabkan kelalaian dan ketidakmampuan para pemimpinnya dalam bersikap adil. Ketidakadilan dan keberpihakan pada salah satu kelompok tertentu, membuat kelompok lainnya merasa diperlakukan tidak adil dan hal ini yang memicu terjadinya pemberontakan dan juga konflik antar sesama warga bangsa. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi fondasi utama bagi para pemimpin bangsa menjalankan dan mengelola suatu bangsa.

Kesimpulan

KH. Abdurahman Wakhid merupakan salah satu tokoh bangsa dan juga Presiden Indonesia ke-5 yang memberikan perhatian pada keberagaman yang dimiliki bangsa ini. Perhatian dan kesadaran akan keragaman yang dimiliki bangsa ini menjadi dasar bagi KH. Abdurahman Wakhid untuk melakukan pembelaan dan mengakomodir perbedaan dan kebutuhan yang berbeda dari setiap warga Negara. Hal ini perlu terus dikembangkan dan diajarkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia agar generasi muda dapat terus menjadi kesatuan dan persatuan bangsa. Nilai-nilai multikultural dalam pemikiran KH. Abdurrahman Wahid meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah :

1. Penghargaan terhadap seluruh manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. Sikap saling menghargai didalamnya mengandung nilai toleransi. Sikap ini adalah suatu

sikap yang perlu dibangun agar setiap warga Negara dapat saling menghormati antar kelompok dan individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi memberikan ruang bagi setiap orang yang berbeda baik pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, untuk hidup bersama berdampingan dengan damai.

2. Nilai Humanisme merupakan suatu sikap yang memandang manusia secara setara dan memberikan penghargaan terhadap seluruh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sama. Nilai humanism mengedepankan sikap kasih sayang, kepedulian, tolong menolong dan mengapresiasi terhadap hal-hal yang baik pada diri manusia. Sikap ini sekaligus sebagai wujud dari ketundukan kepada Allah.
3. Nilai Inklusif (terbuka dalam berfikir) merupakan sikap menghargai perbedaan, baik dalam bentuk pendapat, pemikiran, etnis, tradisi budaya hingga perbedaan agama.
4. Nilai Keadilan, menurut Gus Dur bahwa keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang nilai-nilai multikultural bisa berimplikasi terhadap terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai. Prinsip dan nilai yang ada dalam multikulturalisme melahirkan ketenangan,

kedamaian dan kasih sayang antar sesama serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang toleran, aman, adil dan damai.

Daftar Pustaka

- Achmadi. (2005). *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teoritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, Syaiful. (2013). *Humanisme Gus Dur :Pergumulan Islam Dan Kemanusiaan*. Yogyakarta : Arruz Media.
- Azra, Azyumardi. (2007). *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius & Impulse.
- Banks, James A. (1994). *Multiethnic education: Theory and practice* London: Oxford University Press.
- Barker, Chris. (2000). Penerjemah Nurhadi, *Cultural Studies*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Baso, Ahmad. (2006). *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga,.
- Falah, Yasin Nur. (2019, Januari-Juni). "Pendidikan Damai Alternatif Pendidikan Korban Konflik Komunitas Syi'ah Sampang Madura", *Jurnal Tribakti*, Volume 30, Nomor 1.
- Harun. (2019). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Berbasis Multikultural di SMK Negeri 3 Seluma, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu.
- H.A.R. Tilaar. (2004). *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Komaruddin. (2001). Membangun Teologi Dialogis dan Inklusivistik", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Eds.), *Passing Over, Melintas Batas Agama*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Gramedia.
- Idris. (1987). *Dasar-Dasar Kependidikan* Padang : Angkasa Raya.
- Junaidi, Achmad. (2010). *Gus Dur Presiden Kyai Indonesia; Pemikiran Nyentrik Abdurrahman Wahid dari Pesantren Hingga Parlemen Jalanan*. Surabaya : Diantama.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masyhuri dan M. Zainudin. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Refika Aditama.
- Naim. Ngainun dan Syauqi, Achmad. (2008). *Pendidikan Multikultural, konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Arruz Media.
- Ridwan, Nur Kholik. (2019). *Ajaran-Ajaran Gus Dur*. Yogyakarta : Noktah.
- Syahputra, Muhammad Candra. (2010). "Pendidikan Islam Multikultural (Studi komparasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*,

- Simanjuntak, Payaman J., Falaakh, Fajrul dan Sholeh, Imam Anshori, *Gus Dur, Sang Rekonsiliator*.
- Sukendar. (2011, November). Pendidikan Damai (Peace Education) Bagi Anak-Anak Korban Konflik. *Walisongo*, Volume 19, Nomor 2
- Tim INCReS. 2000. *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran Dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.